

# Kekecewaan terhadap Pasangan Calon Presiden Picu Golput

Koran Tempo - 31 Jan '19 (2)

Sejumlah organisasi masyarakat menganggap sikap golput tidak melanggar aturan.

**Gangsar Parikesit**

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola, mengatakan maraknya gerakan golongan putih saat ini merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap para pasangan calon presiden-wakil presiden. Kedua pasangan calon, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, dianggap tidak memiliki gagasan atau ide baru yang disampaikan saat kampanye.

"Yang muncul justru lebih banyak ujaran kebencian dan kampanye hitam," tutur Alwan kepada *Tempo*, kemarin.

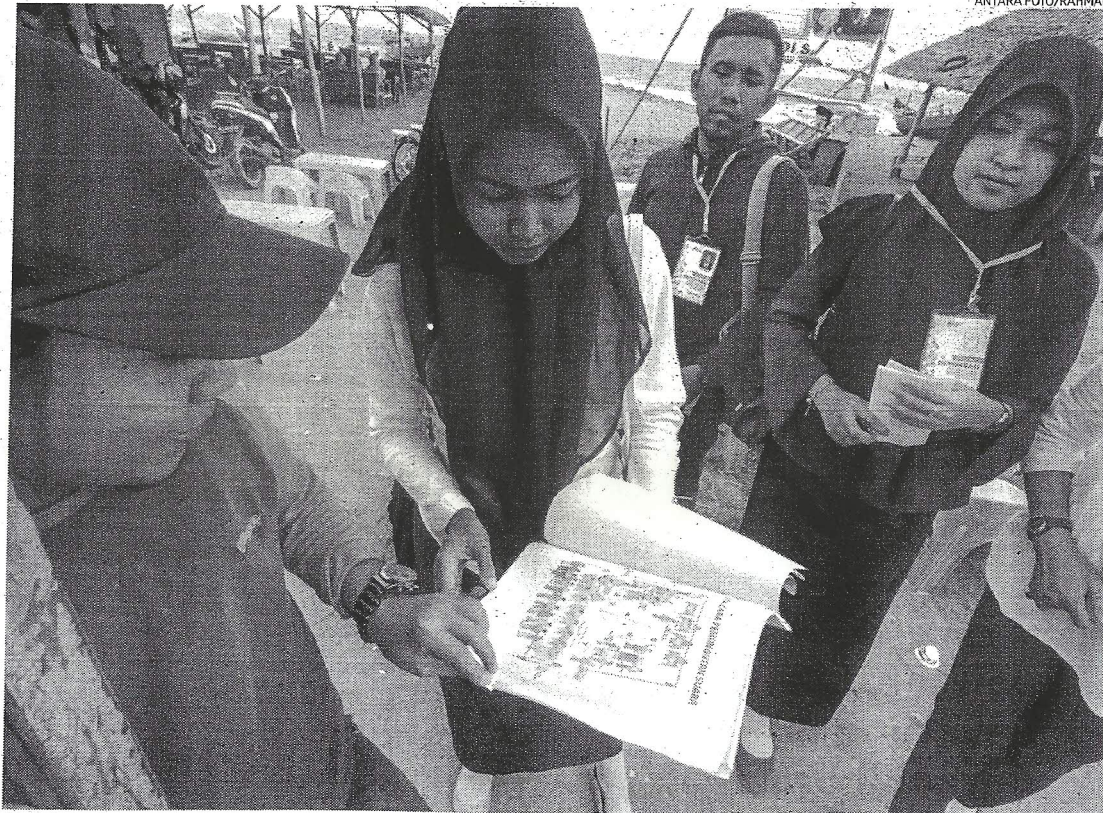
Alwan menjelaskan sikap golput masyarakat menjelang pemilu April mendatang berbeda dengan pilihan golput saat rezim Orde Baru berkuasa. Pilihan golput saat rezim Orde Baru merupakan simbol perlawanan masyarakat

presiden tidak memiliki semangat yang kuat dalam menegakkan HAM. "Padahal, perlindungan dan penegakan HAM sangat penting," ujar dia.

Rabu pekan lalu, Lokataru Foundation bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil membuat pernyataan bahwa golput adalah hak, bukan perbuatan melanggar hukum. Keputusan seseorang dalam mendeklarasikan dan memilih golput dijamin oleh undang-undang.

"Mengambil sikap golput di dalam pemilihan presiden 2019 adalah hak politik warga negara dan bukan pelanggaran," ujar Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Sipil, Arip Yogiawan.

Arip mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang seseorang untuk menjadi golput. Menurut Pasal 515, pihak yang bisa dijerat pidana adalah orang yang dengan sengaja saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang



ANTARA FOTO/RAHMAD

Petugas relawan demokrasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) mensosialisasi pemilihan umum kepada warga agar mengikuti Pemilu 2019 dan tidak golput, di Lhokseumawe, Aceh, Senin lalu.